# BAB V

# PEMBAHASAN

## A. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun daya masyarakat dengan cara memberikan dorongan, motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, pokok pikiran mengenai pemberdayaan ini berkaitan dengan konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan ini juga sering dikaitkan dengan kemampuan individu untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari minat dan keinginan mereka.

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom memberikan ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Jika otonomi desa dapat direalisasikan maka tidak perlu terjadi urbanisasi tenaga potensial ke kota karena desa mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup dan menyusun rencana strategis pembanguann sumber daya alam dan manusia secara terpadu.

Menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi: a) mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang; b) memperkuat daya potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif memperkembangkannya; c) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang. Upaya-upaya yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, serta fasilitas-fasilitasnya.[1]

Konsep pemberdayaan dapat diterapkan pada tingkat individu maupun kelompok dan juga dapat dikaitkan dengan ekonomi, sosial, dan politik.[2] Istilah tersebut dapat digunakan untuk mencirikan berbagai hubungan di dalam rumah tangga atau antara kelompok miskin dan aktor-aktor lainnya di tingkat global. Pemberdayaan organisasi lokal dalam konteks pengelolaan sumber daya berarti memberikan kontrol dan kewenangan yang lebih besar kepada organisasi lokal untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Pembuatan keputusan di tingkat lokal diharapkan dapat lebih mencerminkan permasalahan masyarakat, dan kemudian sumber daya akan dapat dikelola secara lebih efisien, adil, dan berkelanjutan, serta berdimensi kepentingan jangka panjang.

---

[1] I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat,* (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm. 114.

[2] Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi,* (Yogyakarta: Adiyana Pres, 2000), hlm. 1-2

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang ada di desa Wajak Kidul secara langsung dilimpahkan kepada Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Cokro Kusumo yang bekerja sama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Wajak Kidul dilaksanakan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan serta edukasi secara langsung kepada masyarakat. Adapun program-program yang telah dijalankan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah revitalisasi budaya-budaya lokal yang ada dan pengembangan hutan desa.

Salah satu sasaran dari program revitalisasi budaya lokal adalah budaya Tiban yang sekarang ini dianggap mulai surut pelestariannya. Budaya Tiban merupakan budaya asli peninggalan nenek moyang yang secara turun temurun sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat yang harus dilestarikan. Dengan adanya revitalisasi budaya Tiban ini diharapkan dapat menarik wisatawan baik wisatawan lokal maupun luar daerah untuk datang menyaksikan salah satu wisata budaya yang ada di Desa Wajak Kidul yang secara langsung dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat berupa peningkatan pendapatan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhamad, dkk.[3] yang bertujuan untuk memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa

[3] Muhamad, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali), dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23 No. 1, 27 April 2017, hlm. 1-16.

Wisata Penglipuran dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah. Hasil penelitian diketahui bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

**B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata**

Sebuah organisasi ketika menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan aktivitasnya, maka ia dituntut untuk memetakan masalah itu secara komprehensif sebelum kahirnya menentukan skala prioritas mana yang paling utama untuk ditanggulangi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pemuda/i
2. Pandangan/anggapan negatif dari masyarakat
3. Kurangnya wawasan dan pengetahuan terhadap proses pemberdayaan
4. Belum jelasnya regulasi yang ada
5. Belum adanya aturan adat (norma masyarakat)
6. Minimnya permodalan/sumber dana
7. Kurangnya perhatian dari dinas pariwisata
8. Belum jelasnya koordinasi dari pihak perhutani
9. Minimnya akses ke masing-masing destinasi wisata
10. Adanya isu SARA

Dari sekian banyak kendala yang ada, kendala dari peran pemuda merupakan salah satu hal terpeting yang harus segera diselesaikan. Dengan semakin tingginya kontribusi dari pemuda desa, maka diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan wisata di desa Wajak Kidul. Selain itu, meminimalkan isu-isu yang terkait dengan suku, agama, dan ras juga sangat diperlukan untuk tetap menjaga kerukunan dan kelestarian budaya-budaya yang telah ada yang dapat memberikan daya tarik tersendiri atau bisa dijadikan sebagai ciri khas dari salah satu destinasi wisata.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhamad, dkk. [4] di mana dalam penelitian tersebut diketahui bahwa kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi.

## C. Implikasi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Wajak Kidul

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam periode tertentu. Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsikan, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya

[4] Muhamad, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali), dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23 No. 1, 27 April 2017, hlm. 1-16.

pendapatan aka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut juga ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah beras yang kualitasnya kurang baik. Akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka kualitas beras yang dikonsumsi menjadi lebih baik.[5]

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut akan rendah pula. Demikian pula dengan pendapatan masyarakat, jika pendapatan suatu masyarakat relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.[6]

Dengan adanya pengembangan potensi-potensi wisata yang ada di desa Wajak Kidul telah memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha di kawasan wisata dengan bertambahnya pendapatan dari kunjungan wisatawan meskipun dampaknya belum terlihat secara signifikan. Meskipun masih berada dalam proses pengembangan dan belum memberikan dampak secara signifikan, namun besarnya potensi wisata-wisata yang ada di desa Wajak Kidul dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang datang setiap harinya yang semakin bertambah yang juga semakin menambah pendapatan masyarakat pelaku usaha di sekitar daerah wisata.

---

[5] Soekartawi, *Faktor-Faktor Produksi,* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 132.

[6] Mahyu Danil, Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen, dalam *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh,* Vol. IV No.7: 9.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mustangin, dkk.[7] bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan mengoptimalkan program desa wisata dapat dijadikan komoditi pariwisata berbasis potensi lokal masyarakat yang dilakukan di Desa wisata Bumiaji telah memberikan perubahan bagi masyarakat terlebih pada peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat.

[7] Mustangin, dkk., Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji, dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2 No. 1, Desember 2017, hlm. 59-72.